BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UNCLOS (*United Nation Convention on The Law of The Sea*) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. UNCLOS ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut serta menetapkan pedoman untuk lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS memiliki zona-zona laut yang berhak diklaim oleh suatu Negara pantai yaitu Perairan Kepulauan, Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen (Sejarah UNCLOS).

Kebijakan UNCLOS mengatur bahwa setiap negara kepulauan berhak untuk mengklaim kawasan lautnya masing-masing, termasuk diantaranya adalah wilayah perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Dalam pasal 50 UNCLOS disebutkan bahwa negara kepulauan dapat mendefinisikan perairan pedalaman mereka dengan menarik garis penutup pada garis pantainya dan garis penutup yang dikaji dalam kegiatan ini adalah garis penutup teluk (Pasal 50 UNCLOS). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam negara kepulauan Indonesia merupakan perairan pedalaman tempat Indonesia memiliki kedaulatan mutlak (UU No 32, 2014).

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratnya, terdapat 13.466 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 km menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang lebih banyak di bandingkan dengan sumber daya alam di darat (BIG, 2013). Untuk itu penentuan wilayah perairan pedalaman adalah salah satu langkah penting dalam pembangunan kemaritiman yang harus dilakukan dan pembentukan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan zona-zona

laut yang telah diatur dalam *1982 United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982).

Wilayah Indonesia termasuk negara yang belum mendefinisikan perairan pedalaman, sehingga seluruh perairan yang berada di sisi dalam dari garis pangkal dianggap sebagai perairan kepulauan, dengan dianggapnya perairan pedalaman sebagai perairan kepulauan menyebabkan adanya dampak pada hak dan kewenangan yang menimbulkan ancaman baik berupa ancaman keamanan maupun ancaman kerusakan hidup (UNCLOS 1982).

Penentuan perairan pedalaman menjadi penting karena terdapat aturan hukum yang berbeda di perairan pedalaman itu sendiri dengan perairan kepulauan dan laut teritorial. Di perairan pedalaman keluar masuknya kapal asing yang berupa lintas damai harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia karena di perairan pedalaman memiliki sistem kedaulatan Negara pantai secara mutlak, jika keluar masuknya kapal asing tersebut tidak mendapatkan izin maka tidak diijinkan untuk melintas, meskipun kapal lintasan tersebut berupa lintas damai (Pasal 25 UNCLOS), kemudian salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan perairan pedalaman adalah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung adalah sebuah Provinsi paling selatan di pulau Sumatera yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS (BPS Provinsi Lampung, 2017). Dikarenakan Provinsi Lampung sebagian besar dikelilingi oleh lautan, penentuan perairan pedalaman sangat diperlukan agar hukum yang terdapat pada perairan kepulauan berbeda dengan perairan pedalaman. Penelitian ini akan mengkaji serta menentukan garis penutup teluk, sungai dan pelabuhan sebagai perairan pedalaman yang ada di Provinsi Lampung.

1.2. 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah,

1. Bagaimana cara menentukan perairan pedalaman di Provinsi Lampung berdasarkan UNCLOS III?

1.3. Tujuan

1. Menentukan wilayah perairan pedalaman di Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Tugas akhir ini untuk menentukan wilayah perairan pedalaman di Provinsi Lampung agar tidak ada lagi perairan pedalaman yang menyatu dengan perairan kepulauan di Provinsi Lampung berdasarkan UNCLOS III.
2. Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terkait peta wilayah perairan pedalaman Provinsi Lampung.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di bagian sungai, teluk dan pelabuhan yang ada di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah Peta Laut Provinsi Lampung dengan format *Jpeg*, yang kemudian *digeoreferencing* sehingga dapat digunakan untuk proses digitasi perairan pedalaman dengan cara menarik satu teluk ke teluk lainnya atau menarik satu lekukan teluk kemudian dilakukan pengukuran garis yang tidak boleh melebihi 24 mil laut. Hasil dari digitasi tersebut kemudian di layoutkan untuk mendapatkan hasil akhir yaitu peta perairan pedalaman Provinsi Lampung.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II TEORI DASAR

Bab ini Menjelaskan teori dasar yang diperolehkan berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh wilayah perairan pedalaman Provinsi Lampung.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang disajikan dapat berupa Tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran penelitian selanjutnya.